

KOMPETENSI LITERASI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon)

Afifah Arifiya Marasabessy
NPP. 31.0963

Program Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : afifahmarssy19@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Irfan Uluputty,S.STP,M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): The digital literacy competence of civil servants (ASN) is essential for implementing an e-government system where technological proficiency is a primary requirement. ASN's digital literacy is determined using four dimensions proposed by the Ministry of Communication and Information Technology, Siberkreasi, and Deloitte in 2020: digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. **Objective:** The objective of this study is to explore digital literacy within the Ambon City Diskominfo and determine the digital literacy competence of ASN. **Method:** This study employs a qualitative method with a case study approach. Subsequently, inductive content analysis is conducted to determine the digital literacy competence of ASN. **Results/Findings:** The overview of ASN's digital literacy shows that their competence in digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture is at a good level. However, there is a noted deficiency in the lack of appropriate regulations or policies to underpin the functioning of digital culture concerning the digital rights of ASN. **Conclusion:** Civil servants at Ambon City Diskominfo possess good digital literacy competence in the dimensions of digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. Nonetheless, there is a need for clear regulations to support digital culture related to the digital rights of civil servants.

Keywords: ASN, *Competence*, Diskominfo, *Digital Literacy*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Kompetensi literasi digital ASN dibutuhkan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem e-government di mana kemampuan penggunaan teknologi menjadi syarat utama dalam penerapannya. Literasi digital ASN ditentukan dengan menggunakan empat dimensi yang dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi literasi digital di lingkup Diskominfo Kota Ambon dan menentukan kompetensi literasi digital bagi ASN. **Metode:** Metode kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan konten analisis isi induktif untuk menentukan kompetensi literasi digital bagi ASN. **Hasil/Temuan:** Gambaran literasi digital ASN menunjukkan fakta kompetensi ASN terkait kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan

budaya digital sudah berada pada tahap baik. Namun, terdapat kekurangan pada belum adanya regulasi atau peraturan yang tepat untuk mendasari jalannya budaya digital terkait hak-hak digital yang dimiliki ASN. **Kesimpulan:** ASN di Diskominfo Kota Ambon memiliki kompetensi literasi digital yang baik dalam dimensi kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital, meskipun masih diperlukan regulasi yang jelas untuk mendukung budaya digital terkait hak-hak digital ASN.

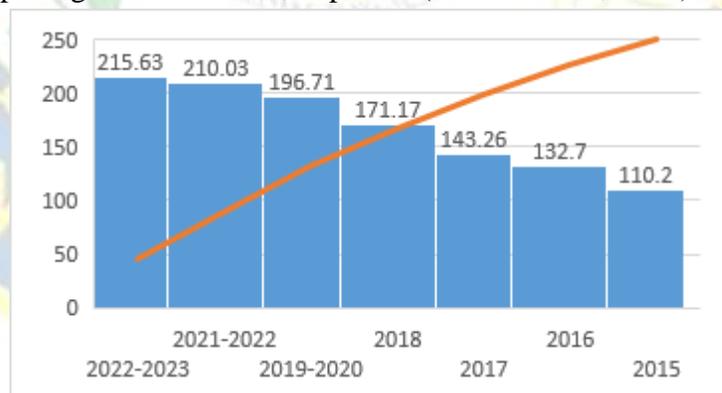
Kata Kunci: ASN, Diskominfo, Kompetensi, Literasi Digital

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

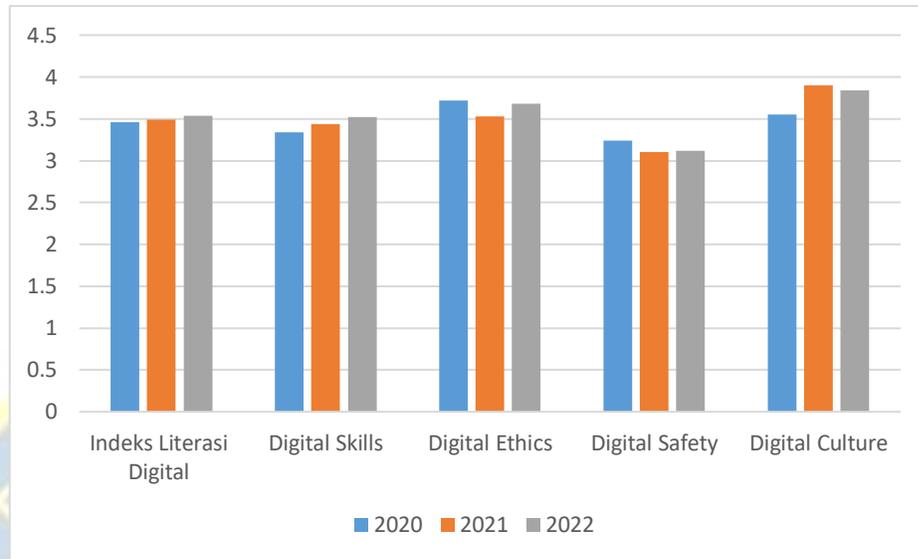
Fenomena literasi digital muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terlebih dengan semakin meningkatnya penggunaan gadget, komputer, dan internet sebagai sarana untuk mempermudah dalam pengaksesan dan penyebaran berbagai jenis informasi. Dalam perkembangannya, tidak semua informasi yang diterima bersifat positif, tak sedikit pula yang bersifat negatif. Diperlukan kebijakan, pengetahuan, dan kemampuan dari setiap pengguna gadget dalam mengendalikan informasi yang diperoleh. Literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam mengakses teknologi sehingga menciptakan interaksi komunikasi dan informasi yang positif (Silalahi et al., 2022).

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada tahun 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa. Hasil ini bila dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen (Suherdi et al., 2021).



Gambar 1.1 Tingkat Pengguna Internet di Indonesia, 2023

Pada hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Katadata Insight Center (KIC) Tahun 2022 terlihat kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia berada di indeks 3.54 dari 5.00. Hal ini menunjukkan tingkat literasi digital di Indonesia masih berada pada kategori "sedang".



Gambar 1.2 Indeks Literasi Digital Indonesia (2020-2023)

Guna meningkatkan literasi digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo melakukan berbagai upaya seperti Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024 hingga Pelatihan Literasi Digital dasar, menengah, dan lanjutan. Kementerian Kominfo juga mengadakan Literasi Digital Sektor Pemerintahan, program khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024 ini mengacu pada empat aspek, yaitu digital skill (kecakapan digital), digital ethics (etika digital), digital safety (keamanan digital), dan digital culture (budaya digital) (Aksenta et al., 2023).

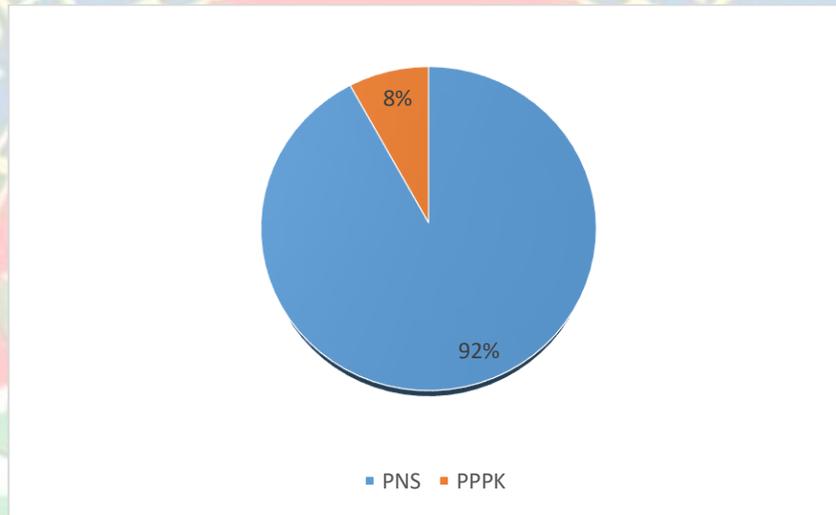
Kehadiran ASN yang cakap akan teknologi baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pemerintahan. ASN diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai pelayanan publik yang optimal salah satunya dengan melalui literasi digital. ASN memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melalui digital. Keseharian ASN berkaitan erat dengan tingkah laku digital mulai dari absensi pegawai, pertanggungjawaban pekerjaan, hingga laporan pensiun di akhir tugasnya. Literasi digital bagi ASN dianggap penting, agar ASN tetap bekerja relevan dan kompetitif (Ahmadi, 2022).

Pelayanan publik yang optimal haruslah berlandaskan pada enam asas pelayanan publik yang tertera dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah Kota Ambon sendiri terus melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku dalam untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon sendiri menyediakan berbagai pelayanan publik yang dapat membantu masyarakatnya. Salah satunya ialah layanan Pusat Komando atau Command Center. Layanan yang diresmikan sejak tahun 2021 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dengan menjadi pusat pemantauan data, informasi, juga situasi dan kondisi Kota Ambon melalui 32 titik Closed Circuit Television (CCTV)

yang terpasang di berbagai ruas jalan, di daerah aliran sungai untuk antisipasi banjir hingga pada tempat pembuangan sampah. Selain itu ada pula bentuk pengaduan pelayanan publik yang disediakan Diskominfo melalui media digital, yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Omnichannel.

Kualitas layanan publik yang optimal dapat dipengaruhi oleh faktor jumlah ASN. Dengan banyaknya jumlah ASN yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi serta keahlian, terutama dalam penguasaan dan pemahaman terkait literasi digital. Laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kondisi per 30 Juni 2022 jumlah ASN yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 4.344.552 dengan rincian jumlah PNS 3.992.766 (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK.



Gambar 1.3 Rasio Jumlah ASN di Indonesia

Dilihat dari kompetensi literasi digital yang dikembangkan berbagai organisasi di daerah, ASN dituntut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang ada sebagai pengguna sistem teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kualitas ASN dianggap penting karena ASN berada pada garis terdepan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, masih banyak ASN yang belum memiliki kecakapan yang memadai. ASN yang berwawasan luas sudah memiliki literasi digital yang baik, namun operasi digitalnya masih lemah, sehingga penggunaan sistem pelayanan publik berbasis digital masih lemah. Masih banyak ASN yang belum memiliki bekal memadai untuk membagi tugas dalam menjalankan pekerjaan. Dibutuhkan kemampuan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, seperti misalnya kemampuan yang berkaitan dengan kepemimpinan.

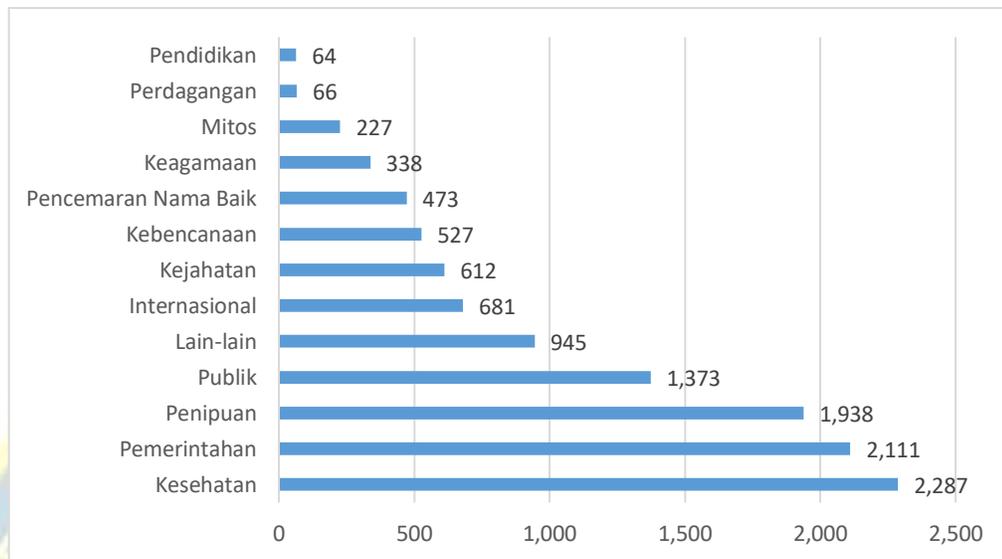
Survei yang dilakukan oleh Institute Management Development (IMD) terkait Global World Digital Competitiveness Index 2020 menunjukkan tingkat literasi digital Indonesia yang mengalami stagnasi selama tahun 2019 dan 2020. Pada tahun tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-56 dari total 63 negara yang telah dilakukan survei atau bisa dikatakan masuk 10 negara terendah dalam literasi digital. Survei yang dilakukan Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan aspek digital insights, digital skills, dan digital behavior pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ASN

yang berwawasan luas sudah memiliki literasi digital yang baik, namun operasi digitalnya masih lemah. Selain itu, dalam beberapa sumber membuktikan literasi digital di kalangan ASN masih sangat rendah. Berbagai kasus terungkap dalam media massa. Beberapa contohnya berkaitan dengan status ASN dalam media yang bertentangan dengan Pancasila dan juga Etika PNS. ASN dituntut agar memiliki kompetensi digital mengingat situasi perkembangan teknologi yang tidak bisa diprediksi. Perkembangan teknologi, menghasilkan ASN yang cakap terhadap teknologi dikarenakan ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

Pemerintah di beberapa daerah selain menjalankan program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia yang diusung oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo juga menerapkan upaya peningkatan literasi digital seperti, program kegiatan Literasi Digital bersama kelompok Masyarakat dan Komunitas di Lorong Wisata (Longwis) yang diadakan di Kota Makassar. Program unggulan Longwis ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia, hal ini menjadikan Longwis sebagai pusat edukasi literasi digital yang tepat di Kota Makassar. Ada pula Program Literasi Digital Netizen Fair yang diadakan Pemkot Medan, Program Literasi Digital ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan internet dan teknologi secara aman, beretika, dan optimal. Program ini dijalankan dengan menghadirkan kelas-kelas, talk show (gelar wicara) interaktif yang akan membahas pilar-pilar literasi digital serta isu-isu relevan, juga berbagai ruang pameran dari komunitas-komunitas lokal.

Akibat dari perkembangan teknologi digital membuat ASN mengalami culture shock dalam berbagai aspek budaya digital. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet terkait penyebaran informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi. Beberapa tahun yang lalu penerimaan dan pencarian informasi masih dilakukan melalui media tradisional, seperti koran, majalah ataupun artikel dan belum secepat seperti sekarang ini yang sebagian besar penyebarannya dilakukan melalui media sosial. Namun, dalam perkembangannya ini ternyata masih banyak masyarakat dan ASN yang gagap dalam memilah dan memilih informasi sehingga masih banyak ditemukan berita-berita yang menyesatkan atau hoaks.

Pada Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 50/HM/Kominfo/04/2023 menyatakan selama tiga bulan berturut-turut pada tahun 2023, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di berbagai platform digital. Jumlah ini bila dibandingkan dengan tiga bulan pertama di tahun 2022 yang hanya mencapai 393 isu hoaks telah mengalami peningkatan.

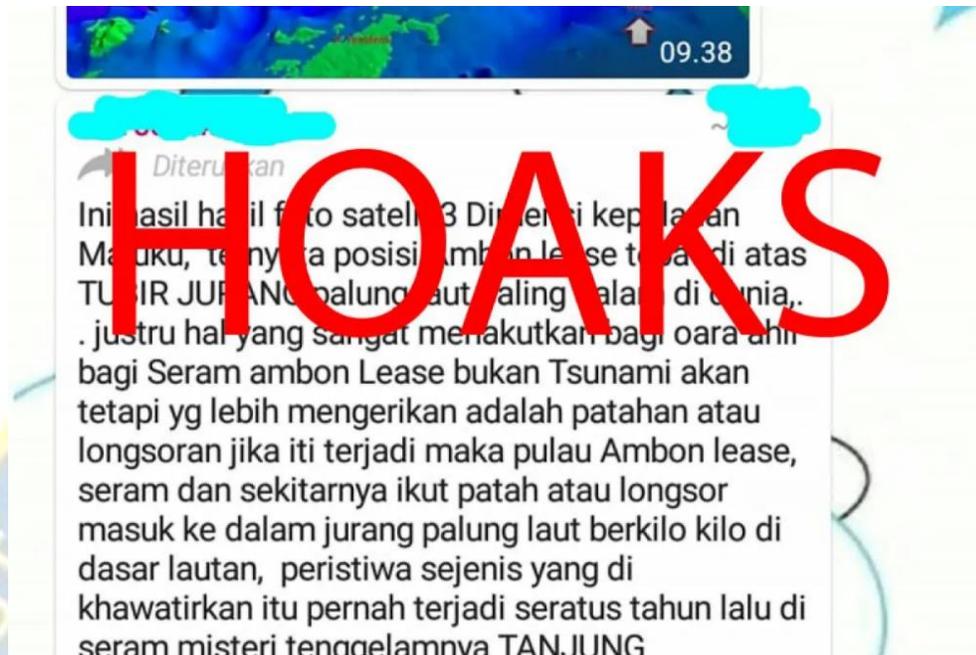


Gambar 1.4 Statistik Temuan Isu Hoaks Per Kategori 2018-2023

Kategori isu hoaks paling banyak adalah terkait dengan kesehatan. Tim AIS (Mesin Pengais Konten Negatif) Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.256 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Saat ini meskipun Indonesia telah memasuki masa endemi Covid-19, pada kenyataannya masih banyak isu hoaks yang beredar terkait dengan Covid-19 mulai dari isu tentang penyebaran virus jenis baru, vaksinasi, maupun obat-obatan herbal atau produk kesehatan yang dapat menyembuhkan Covid-19. Kategori pemerintahan berada di urutan kedua kategori penyebaran isu hoaks terbanyak setelah kesehatan. Kasus paling banyak adalah terkait dengan akun palsu milik pejabat pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Selain itu, muncul juga isu-isu terkait kebijakan pemerintah yang baru diterbitkan. Kemudian disusul kategori penipuan, politik, dan lain-lain.

Penyebaran berita hoaks ini kian hari kian meningkat dan terjadi hampir di seluruh pelosok negeri tak terkecuali juga dengan Provinsi Maluku terkhususnya Kota Ambon. Kota Ambon sudah lama dibanjiri dengan adanya berita hoaks, kasus yang sempat viral adalah informasi gempa dan tsunami susulan yang mengatasmakan Walikota Ambon di tahun 2019. Penyebaran informasi ini beredar melalui broadcast Whatsapp, Facebook, maupun SMS. Isu ini cukup membuat masyarakat takut dan resah karena dilakukan melalui unggahan di media dan sempat viral. Pelaku mengaku menyebarkan informasi tersebut hanya untuk bermain-main.

Muncul pula hoaks terkait Penculikan Anak, berdasarkan informasi yang tersebar penculikan anak ini dilakukan dengan cara membius korban. Peristiwa tersebut menimpa seorang anak Sekolah Dasar (SD) Negeri 77 Passo berinisial CT. Berita yang disebar ini ternyata adalah berita hoaks, anak yang diakui sebagai korban ternyata sedang pergi jalan-jalan bersama temannya dalam waktu yang lama. Kemudian, karena takut dimarahi sehingga membuat korban membuat cerita seakan-akan mau diculik dan berita ini dipercaya oleh kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja disebabkan karena masyarakat yang kurang pandai dalam memilah berita yang tersebar.



Gambar 1.5 Kasus Hoaks yang Beredar

Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi) menganggap semakin maraknya berita bohong/hoaks melalui media sosial adalah tantangan dalam pengembangan pelayanan di DiskominfoSandi. Pada tahun 2021, Kota Ambon terpilih sebagai kota satelit penyelenggara workshop Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo RI. Hal ini dikarenakan indeks literasi digital di Kota Ambon yang cukup tinggi. Berdasarkan survei status digital Indonesia tahun 2020 oleh Katadata Insight Center dengan Kementerian Kominfo RI, Kota Ambon memiliki indeks literasi digital sebesar 3,80. Skala Indeks literasi digital yang cukup tinggi di Kota Ambon menjadi modal Kota Ambon dalam melaksanakan penerapan digitalisasi dan proses layanan informasi publik.

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), DiskominfoSandi memiliki fungsi dan tugas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang pemerintahan berbasis TIK yang merupakan salah satu upaya menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Menanggapi hal ini ASN sebagai penggerak pelayanan haruslah memiliki kompetensi yang memadai dalam mewujudkan pelayanan berbasis TIK. Sehingga ASN membutuhkan literasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Hal ini menjadi daya tarik penelitian ini yang memfokuskan kepada ASN di Kota Ambon yang memiliki kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya untuk selanjutnya bisa mengetahui kompetensi literasi digital ASN seperti apa yang dimaksudkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fenomena literasi digital yang telah diuraikan sebelumnya menjadi fokus permasalahan penelitian ini. Indeks literasi digital yang cukup tinggi di Kota Ambon menjadi modal bagi kota tersebut dalam melaksanakan digitalisasi pada proses layanan informasi publik. Namun, meskipun indeks tersebut cukup tinggi, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan literasi digital di kalangan ASN. Kesenjangan ini terutama terlihat pada kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal, baik dari segi kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, maupun budaya digital.

ASN di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada literasi digital di kalangan ASN dengan tujuan utama mengeksplorasi dan menggambarkan kompetensi mereka dalam empat dimensi literasi digital yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan untuk mendalami kesenjangan ini meliputi: Bagaimana literasi digital ASN di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon? Apa saja kompetensi literasi digital yang diperlukan bagi ASN untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan ASN dalam membangun budaya literasi digital, yang mencakup kecakapan dalam menggunakan perangkat digital, memahami tata kelola digital, meningkatkan kesadaran akan keamanan data, serta mengembangkan wawasan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam konteks digitalisasi.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep terkait kompetensi literasi digital ASN yang dapat menjadi dasar bagi peningkatan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan program pelatihan literasi digital, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga dapat mendukung tercapainya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien di Kota Ambon.

1.3 Penelitian Terdahulu

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan mengenai literasi digital ASN adalah studi yang dilakukan oleh Rumata V. M. dan Nugraha D. A. dalam jurnal "Studi Komunikasi" (2020) yang berjudul "Rendahnya tingkat perilaku digital ASN Kementerian Kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah". Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi digital di kalangan ASN dalam era revolusi industri 4.0. Fokus penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka literasi digital yang mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan, keahlian digital, dan perilaku. Hasil survei yang melibatkan 752 responden di Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa 44.9 persen responden memiliki tingkat literasi digital yang baik, namun masih terdapat 13.7 persen responden dengan tingkat literasi digital yang kurang, mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan literasi digital di kalangan ASN (Rumata & Nugraha, 2020).

Penelitian lain oleh Wulandari I., Priatna R., dan Andikaputra F. A. dalam jurnal "PubBis" (2022) berfokus pada literasi digital ASN di Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan metode

kualitatif melalui kuesioner dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa banyak ASN yang masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai literasi digital. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pendidikan literasi digital bagi ASN sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan digital mereka (Wulandari et al., 2022).

Takariani C. S., Sari D., dan rekan-rekan dalam jurnal "Pekommas" (2023) juga melakukan penelitian serupa namun dengan fokus pada masyarakat umum di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Studi ini menemukan bahwa tingkat literasi digital masyarakat secara umum berada pada level sedang, dengan variabel sosiodemografis seperti tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan menunjukkan hubungan signifikan dengan literasi digital. Temuan ini menekankan pentingnya faktor pendidikan dalam meningkatkan literasi digital, yang juga relevan untuk konteks ASN (Takariani et al., 2023).

Syah A. F. dalam jurnal "Public Service" (2021) menekankan pentingnya literasi digital dalam peningkatan kualitas layanan publik pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengidentifikasi delapan aspek literasi digital yang penting untuk evaluasi kualitas layanan publik. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk desain layanan publik berbasis digital yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat diterapkan secara menyeluruh oleh ASN (Syah, 2021).

Wajdi M., Akib T., dan rekan-rekan dalam jurnal "Riset dan Inovasi Pembelajaran" (2021) meneliti hubungan antara kecakapan literasi digital guru dan kreativitas mengajar di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara literasi digital dan kreativitas mengajar, dengan kecakapan literasi digital menjelaskan 53% variansi kreativitas mengajar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi digital tidak hanya penting untuk ASN tetapi juga untuk profesional lainnya seperti guru (Wajdi et al., 2021).

Penelitian oleh Iriansyah A., Gafallo M. F. Y., dan rekan-rekan dalam "Civil Service Journal" (2023) membahas penguatan literasi digital pada ASN untuk pelayanan publik berbasis digital. Studi ini menggunakan metode studi kepustakaan dan menemukan bahwa pelatihan literasi digital seringkali dilakukan sebagai formalitas. Hal ini mengakibatkan kompetensi ASN dalam teknologi digital tetap rendah dan tidak efektif dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital (Iriansyah et al., 2023).

Yazid Y., Nazamuddin N., dan rekan-rekan dalam "JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam" (2021) melakukan kegiatan pengabdian untuk mengembangkan indeks literasi pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melalui teknik resume buku digital. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu dan kurangnya akses informasi digital. Pendampingan dan workshop yang dilakukan membantu meningkatkan kebiasaan membaca digital dan kemampuan meresume buku digital, yang dapat diterapkan juga pada ASN untuk meningkatkan literasi digital mereka (Yazid et al., 2021).

Penelitian oleh Sabatti P. H. P. D. A. D. dalam "Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma" (2023) mengkaji literasi digital pada PNS di beberapa kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia dan lama bekerja berkorelasi negatif dengan literasi digital, sedangkan tingkat pendidikan dan durasi mengakses internet berkorelasi positif. Temuan ini menunjukkan bahwa

literasi digital lebih tinggi pada PNS yang lebih muda, lebih berpendidikan, dan lebih sering menggunakan internet (Sabatti, 2023).

Sari P. B. dan Dwilita H. dalam jurnal "Kajian Akuntansi" (2018) meneliti prospek financial technology (fintech) di Sumatera Utara dengan melihat literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kemiskinan. Studi ini menemukan bahwa fintech dapat berkembang pesat di Sumatera Utara dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik. Penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan dapat membantu mengurangi kemiskinan, yang relevan dengan upaya peningkatan literasi digital pada ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik (Sari & Dwilita, 2018).

Terakhir, Suroto H. dalam "Jurnal JARLITBANG Pendidikan" (2017) meneliti budaya literasi di kalangan PNS di Papua. Temuan menunjukkan rendahnya minat baca di kalangan PNS, yang diperparah dengan kurangnya penggunaan media digital. Program membaca buku selama 15 menit per hari dan pengenalan literasi digital diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan literasi PNS di Papua, yang juga relevan untuk peningkatan literasi digital ASN secara umum (Suroto, 2017).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan ASN, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Literasi digital merupakan elemen kunci untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien di era digital. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih efektif dan program pendidikan yang terstruktur diperlukan untuk memastikan ASN memiliki kompetensi digital yang memadai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan sejumlah kontribusi baru dalam bidang literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun literasi digital telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, fokus spesifik pada dimensi literasi digital yang diterapkan pada ASN di lingkungan pemerintah kota tertentu masih sangat terbatas. Penelitian ini mengeksplorasi literasi digital ASN di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon dengan menggunakan empat dimensi literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Kebaruan pertama dalam penelitian ini adalah pendekatan komprehensif yang menggabungkan metode kualitatif dengan studi kasus dan konten analisis induktif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan tingkat literasi digital, tetapi juga memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi literasi digital ASN secara lebih mendalam. Penggunaan empat dimensi literasi digital sebagai kerangka analisis juga merupakan inovasi, karena memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kompetensi yang diperlukan ASN dalam era digital.

Kebaruan kedua adalah fokus geografis pada Kota Ambon, yang merupakan salah satu kota dengan indeks literasi digital cukup tinggi. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai benchmark untuk kota-kota lain di Indonesia

yang memiliki karakteristik demografis dan administratif serupa. Hal ini penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih terfokus pada wilayah metropolitan besar atau nasional.

Kebaruan ketiga terletak pada implikasi praktis dari temuan penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan spesifik untuk meningkatkan literasi digital ASN di Kota Ambon. Ini termasuk kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang mendukung budaya digital dan hak-hak digital ASN, serta pentingnya program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang relevan menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan ASN, baik di tingkat nasional maupun lokal. Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam literasi digital di beberapa instansi pemerintah, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal keamanan digital dan pemahaman akan etika digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan program pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi literasi digital ASN di berbagai tingkatan pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyoroti literasi digital secara umum di berbagai instansi pemerintah, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi kompetensi literasi digital ASN di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon. Fokusnya yang terarah pada satu unit kerja spesifik memungkinkan penelitian ini untuk mendalami tentang tantangan dan potensi yang unik di lingkungan tersebut. Hal ini memungkinkan hasil penelitian memberikan wawasan yang lebih detail dan relevan dalam konteks implementasi kebijakan dan program literasi digital di level lokal.

Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan dari penelitian sebelumnya dengan mengidentifikasi secara spesifik dimensi literasi digital yang menjadi fokus, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Penekanan pada empat aspek ini memberikan pandangan holistik tentang kemampuan dan kebutuhan ASN di Dinas Komunikasi Ambon dalam menghadapi tantangan digital yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga menyediakan data yang lebih terperinci untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan peningkatan kompetensi ASN dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pelayanan publik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun budaya literasi digital, sesuai dengan aspek Pengembangan Kurikulum Literasi Digital yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi kecakapan digital ASN, termasuk kemampuan mereka dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat digital secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan ASN dalam menyadari, mencontohkan, dan menyesuaikan diri dengan tata kelola perangkat digital yang baik.

Penelitian ini juga akan mengkaji tingkat kesadaran ASN terhadap pentingnya perlindungan data dalam penggunaan perangkat digital, serta kemampuan mereka dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan ASN dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam konteks budaya digitalisasi melalui pemanfaatan perangkat digital. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep yang komprehensif terkait kompetensi literasi digital ASN, yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan publik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literasi digital di kalangan ASN dan mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bahan tertulis dan mendapatkan jawaban terhadap berbagai pertanyaan penelitian. Pendekatan kualitatif sering kali menempatkan teori sebagai poin akhir penelitian, di mana peneliti membentuk konsep, teori, atau model berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Metode eksploratif diterapkan untuk mendalami dan memahami literasi digital ASN. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena yang ada dan belum diteliti sebelumnya, terutama terkait literasi digital ASN di Kota Ambon. Dengan pendekatan ini, penelitian akan disusun secara sistematis, logis, dan objektif, berangkat dari fenomena yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Arikunto, n.d.).

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Kompetensi Pengembangan Literasi Digital yang terdiri dari empat pilar: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Setiap pilar memiliki empat indikator yang dijadikan dasar operasionalisasi konsep. Pilar kecakapan digital mencakup pengetahuan dasar tentang lanskap digital, mesin pencari, aplikasi percakapan, dan transaksi digital. Pilar etika digital meliputi netiquette, informasi negatif, interaksi digital, dan transaksi elektronik. Pilar keamanan digital mencakup proteksi perangkat keras, identitas digital, penipuan digital, dan rekam jejak digital. Pilar budaya digital melibatkan nilai-nilai Pancasila, digitalisasi kebudayaan, perilaku mencintai produk dalam negeri, dan hak-hak digital. Operasional konsep ini dirancang untuk memastikan penelitian berjalan sesuai teori Pengembangan Literasi Digital (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan ASN di Kota Ambon, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis dan observasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, fokus pada ASN yang terkait dengan literasi digital. Informan utama meliputi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Sekretaris Dinas, serta beberapa kepala bidang dan pranata humas. Kodifikasi digunakan untuk memudahkan analisis data.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petunjuk umum untuk memperoleh data primer, sementara observasi partisipan dilakukan

untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Dokumentasi melibatkan pencatatan data tertulis dan media lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi dan empat tahapan: pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusions: drawing/verifying). Pendekatan ini memastikan data yang diperoleh lengkap dan mendalam, menghasilkan temuan yang akurat dan dapat diandalkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Etika Digital

Etika digital pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu etika berinternet, pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, serta pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Etika Berinternet

Etika berinternet menjadi aspek penting yang menilai kemampuan ASN dalam menerapkan etika saat beraktivitas di dunia maya. ASN di Diskominfo Kota Ambon menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami dan menerapkan etika berinternet. Standar prosedur operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh Diskominfo menjadi pedoman bagi ASN dalam berperilaku di ruang digital. SOP ini memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan etika yang telah ditetapkan, meminimalkan risiko pelanggaran etika digital.

Pengetahuan Mengenai Informasi yang Mengandung Hoaks, Ujaran Kebencian, Pornografi, Perundungan, dan Konten Negatif Lainnya

Dalam era digital, penyebaran informasi dapat terjadi dengan cepat dan luas. Untuk mengatasi dampak negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, dan konten negatif lainnya, ASN perlu memiliki pemahaman yang baik tentang jenis-jenis informasi tersebut. Diskominfo Kota Ambon telah berhasil mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam SOP dan kegiatan pemantauan terhadap penyebaran informasi di ruang digital. Tidak adanya kasus pelanggaran etika digital yang dilakukan oleh ASN menunjukkan keberhasilan dalam meminimalkan dampak negatif dari informasi yang mengandung hoaks dan konten negatif lainnya.

Pengetahuan Dasar Berinteraksi, Partisipasi, dan Kolaborasi Di Ruang Digital

Kemampuan berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Diskominfo Kota Ambon telah menggunakan media sosial dan aplikasi percakapan sebagai sarana untuk berinteraksi dan

berkolaborasi antar ASN. ASN memahami kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam berinteraksi di ruang digital.

Pengetahuan Dasar Berinteraksi dan Bertransaksi Secara Elektronik di Ruang Digital

Perkembangan teknologi telah memungkinkan transaksi elektronik menjadi hal yang umum dilakukan. Diskominfo Kota Ambon telah memastikan bahwa ASN memiliki pemahaman yang baik tentang etika bertransaksi secara elektronik. Melalui aplikasi pendukung seperti LinkAja!, ASN dapat melakukan transaksi secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak adanya kasus pelanggaran dalam bertransaksi elektronik menunjukkan bahwa ASN telah memahami tata cara berperilaku di ruang digital.

3.2 Keamanan Digital

Keamanan digital memegang peranan penting dalam lingkungan kerja ASN, terutama dalam penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aktivitas di platform digital. Melalui empat indikator utama, ASN dapat dinilai dalam hal pengetahuan mereka tentang keamanan digital pada literasi digital.

Pengetahuan Dasar Mengenai Fitur Proteksi Perangkat Keras

Perangkat keras seperti gadget, komputer, dan laptop adalah bagian integral dari aktivitas sehari-hari ASN. Pemahaman tentang fitur proteksi pada perangkat keras menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaan. Diskominfo Kota Ambon telah aktif melibatkan ASN dalam workshop dan diklat terkait Cyber Security, yang membantu meningkatkan pemahaman akan fitur proteksi perangkat keras. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Diskominfo dalam memastikan bahwa ASN memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan perangkat keras.

Pengetahuan Dasar Mengenai Proteksi Identitas Digital dan Data Pribadi di Platform Digital

Aktivitas di platform digital sering melibatkan penyimpanan dan pengelolaan identitas digital serta data pribadi. ASN perlu memahami pentingnya proteksi identitas digital dan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data. Diskominfo Kota Ambon telah berhasil melibatkan ASN dalam kegiatan diklat dan workshop terkait Cyber Security, yang membahas proteksi identitas digital dan data pribadi. Keterlibatan aktif ASN dalam acara-acara tersebut menandakan kesadaran yang baik terhadap pentingnya keamanan data pribadi.

Pengetahuan Dasar Mengenai Penipuan Digital

Penyebaran informasi melalui internet sering kali menjadi sarana untuk penipuan digital. ASN perlu memahami cara menyaring informasi dan menghindari penipuan dalam berbagai aktivitas online, termasuk belanja dan bertransaksi. Diskominfo Kota Ambon telah memastikan bahwa ASN memiliki pengetahuan dasar mengenai penipuan digital. Dengan menggunakan aplikasi belanja online

yang legal, ASN dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan. Tidak adanya kasus penyebaran informasi palsu oleh ASN menunjukkan tingkat pemahaman yang baik dalam menghadapi ancaman penipuan digital.

Pengetahuan Dasar Mengenai Rekam Jejak Digital di Media (Mengunduh dan Mengunggah)

Rekam jejak digital, seperti mengunduh dan mengunggah informasi, menjadi hal yang umum dalam aktivitas ASN. Diskominfo Kota Ambon telah berhasil mengintegrasikan pemahaman ASN terkait rekam jejak digital di media melalui partisipasi dalam berbagai workshop dan diklat. ASN yang aktif dalam mengunggah informasi terkini melalui media milik Diskominfo menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya rekam jejak digital.

3.3 Budaya Digital

Budaya digital menjadi fenomena yang tak terelakkan seiring dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlanjut. Dalam mengevaluasi budaya digital, terdapat empat indikator utama yang digunakan sebagai penilaian terhadap pemahaman ASN.

Pengetahuan Dasar Akan Nilai-Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Landasan Kecakapan Digital dalam Kehidupan Berbudaya, Berbangsa, dan Bernegara

Sebagai warga negara Indonesia, ASN diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Diskominfo Kota Ambon telah menunjukkan komitmennya dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui produksi konten yang disebar pada media digital. Keberhasilan ini mencerminkan pemahaman yang baik akan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam beraktivitas secara digital.

Digitalisasi Kebudayaan Melalui Pemanfaatan TIK

Literasi digital di kalangan ASN mendorong penggunaan yang efektif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengadaptasi digitalisasi kebudayaan. ASN Diskominfo Kota Ambon telah berhasil memanfaatkan media telekonferensi dan media entertainment seperti WhatsApp dan Facebook dengan intensitas penggunaan yang tinggi. Fasilitas yang disediakan oleh Diskominfo, seperti layanan Wi-Fi, memperkuat keberhasilan digitalisasi kebudayaan dalam lingkungan kerja.

Pengetahuan Dasar yang Mendorong Perilaku Mencintai Produk Dalam Negeri dan Kegiatan Produktif Lainnya

Perilaku belanja melalui media digital kini menjadi hal umum, namun ASN perlu diberdayakan untuk mencintai produk dalam negeri. Diskominfo Kota Ambon mengambil langkah dengan mengembangkan aplikasi Ambon Access untuk meningkatkan penjualan produk UMKM lokal. Langkah ini menunjukkan komitmen ASN dalam mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk dalam negeri.

Digital Rights

Pembahasan mengenai hak-hak digital memperlihatkan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Meskipun ASN telah diberikan hak digital sesuai dengan semestinya, namun belum adanya regulasi yang mendukung menjadi catatan penting. Diskominfo Kota Ambon perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi yang mengatur hak-hak digital ASN guna melindungi kepentingan dan privasi mereka.

3.4 Kompetensi ASN Berdasarkan Hasil Konten Analisis Isi Induktif

Kompetensi dalam pengembangan literasi digital telah dijabarkan oleh Kemenkominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020, membaginya ke dalam empat dimensi dengan masing-masing empat indikator, menyusun total enam belas indikator sebagai tolak ukur literasi digital. Kinerja literasi digital dianggap baik jika memenuhi keenam belas indikator tersebut.

ASN membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, termasuk kompetensi manajerial, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Terdapat delapan aspek kompetensi manajerial yang esensial untuk dimiliki ASN.

Studi kasus di Diskominfo Kota Ambon menunjukkan hasil yang baik dalam eksplorasi literasi digital ASN. Untuk merumuskan kompetensi literasi digital ASN, perlu merujuk pada UU/05/2014 dan hasil eksplorasi literasi digital ASN.

Standar kompetensi literasi digital ASN dapat dijabarkan sebagai Pelayanan Publik MelekTeknologi, di mana ASN memiliki kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. ASN harus mampu melakukan kerjasama, komunikasi, dan pengembangan diri untuk mengelola perubahan menuju era digitalisasi, menciptakan pelayanan publik berbasis digital yang lebih fleksibel dan efisien.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian mengenai literasi digital ASN di Diskominfo Kota Ambon menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep literasi digital. Temuan menunjukkan bahwa ASN telah memiliki pengetahuan dasar yang baik dalam berbagai aspek literasi digital, seperti kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, seperti kebutuhan akan regulasi atau peraturan yang mendukung hak-hak digital ASN. Selain itu, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Diskusi juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi manajerial ASN, terutama dalam konteks literasi digital. Hal ini termasuk dalam hal integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi

pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan literasi digital di Diskominfo Kota Ambon, serta memberikan dasar untuk pengembangan strategi dan program pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam era digitalisasi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi mengenai temuan menarik dalam penelitian literasi digital ASN di Diskominfo Kota Ambon mencakup beberapa aspek yang patut diperhatikan. Salah satu temuan menarik adalah kesadaran ASN akan pentingnya proteksi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemahaman mengenai penipuan digital. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan digital di lingkungan kerja.

Selain itu, aplikasi Ambon Access yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Ambon untuk mendukung penjualan produk UMKM lokal menarik perhatian. Ini menunjukkan komitmen untuk mendorong penggunaan teknologi dalam mendukung ekonomi lokal dan memperkuat budaya digital yang inklusif.

Namun, masih terdapat tantangan terkait pengembangan regulasi yang mendukung hak-hak digital ASN, seperti perlindungan data privasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Ini menyoroti pentingnya perhatian lebih lanjut dalam aspek hukum dan kebijakan terkait literasi digital.

Selain itu, temuan mengenai kompetensi manajerial ASN yang diperlukan dalam konteks literasi digital juga menarik. Pengembangan kompetensi seperti integritas, kerjasama, dan pengambilan keputusan menjadi esensial dalam era digitalisasi.

IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa literasi digital ASN di Diskominfo Kota Ambon sudah berada pada kategori baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Dimensi kecakapan digital, etika digital, dan keamanan digital dinilai sudah baik, sementara dimensi budaya digital masih membutuhkan perhatian khusus terkait regulasi yang mendukung indikator tersebut.

Temuan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan kompetensi literasi digital bagi ASN. Diskominfo Kota Ambon disarankan untuk mengadakan program peningkatan kompetensi pada masing-masing dimensi literasi digital. Ini termasuk mengikuti berbagai workshop atau diklat terkait kecakapan digital, mengeluarkan SOP atau peraturan terkait etika digital, meningkatkan kesadaran akan keamanan digital melalui workshop atau diklat cyber security, serta

melibatkan ASN dalam membangun budaya digital yang berlandaskan nilai-nilai berbudaya, berbangsa, dan bernegara.

Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan literasi digital ASN di Diskominfo Kota Ambon dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik berbasis digital. Literasi digital menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital di era digitalisasi saat ini.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang literasi digital ASN di Diskominfo Kota Ambon, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu instansi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada instansi lain. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan mungkin tidak mencakup seluruh kompleksitas literasi digital, sehingga beberapa aspek mungkin tidak terungkap sepenuhnya. Ketiga, adanya ketergantungan pada data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keakuratan temuan. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya mungkin membatasi kedalaman analisis dan generalisasi temuan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan secara lebih luas dan mendalam di masa mendatang untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang literasi digital ASN di berbagai instansi pemerintah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya, ada beberapa arah yang dapat dieksplorasi untuk memperluas pemahaman tentang literasi digital ASN dan meningkatkan penerapannya dalam konteks pelayanan publik. Pertama, penelitian dapat melibatkan lebih banyak instansi pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif. Kedua, penggunaan pendekatan campuran (*mixed-methods*) dapat diterapkan untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Ketiga, fokus penelitian dapat diperluas untuk melihat dampak literasi digital terhadap kinerja pelayanan publik dan efektivitas kebijakan. Keempat, pengembangan program pelatihan dan pengembangan diri yang disesuaikan dengan kebutuhan literasi digital ASN dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi di lapangan. Dengan demikian, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih konkret dalam menghadapi tantangan literasi digital di sektor pemerintahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. (2022). Merdeka Belajar VS Literasi Digital. In *Cahya Ghani Recovery*.
- Aksenta, A., Irmawati, Hayati, N., Sepriano, Herlinah, Silalahi, A. T., Pipin, S. J., Abdurrohman, I., Boari, Y., Mardiana, S., Sutoyo, Muh. N., Sumardi, Gani, I. P., & Ginting, T. W. (2023). LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0. In *Perspektif* (Vol. 1, Issue 2).
- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.
- Iriansyah, A., Gafallo, M. F. Y., Widiatmaka, P., Adiansyah, A., & Akbar, T. (2023). PENGUATAN LITERASI DIGITAL PADA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL. *Civil Service Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.61133/pns.v17i1.409>
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2). <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>
- Sabatti, P. H. P. D. A. D. (2023). Literasi Digital pada PNS. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4(2). <https://doi.org/10.24071/suksma.v4i2.6937>
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1).
- Silalahi, D. E., Silalahi, D. E., Munthe, E. A. H. B., Wahyuni, M. M. S. S., Jamaludin, R. M., Laela, N. A., & Safii, D. M. M. S. A. R. H. Moh. (2022). Literasi Digital Berbasis Pendidikan. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Suherdi, D., Rezky, S. F., Apdilah, D., Sinuraya, J., Sahputra, A., Syahputra, D., & Wahyuni, D. (2021). Peran Literasi Digital Di Masa Pandemi. In *CATTLEYA DARMAYA FORTUNA* (Vol. 123).
- Suroto, H. (2017). Menumbuhkembangkan Budaya Literasi Kalangan Pegawai Negeri Sipil di Papua. *Jurnal JARLITBANG Pendidikan*, 3(2).
- Syah, A. F. (2021). Literasi Digital Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah. *Jurnal Public Service*, 15(2).
- Takariani, C. S., Sari, D., Pangaribuan, T. R. A., & Simatupang, O. (2023). Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pekommas*, 8(1). <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5108>
- Wajdi, M., Akib, T., Natsir, M., Hasan, E., & Abidin, A. (2021). HUBUNGAN ANTARA KECAKAPAN LITERASI DIGITAL DENGAN KREATIVITAS MENGAJAR GURU DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 1(3). <https://doi.org/10.51574/jrip.v1i3.259>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra, F. A. T. (2022). Literasi Digital ASN Kabupaten Sumedang. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v6i2.638>
- Yazid, Y., Nazamuddin, N., Rizza, M., Arifin, Z., Sitepu, A., Hidayat, N., MK, Z., Supinto, S., Jailani, M., & Batubara, M. H. (2021). PENGEMBANGAN INDEKS LITERASI PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH MELALUI TEKNIK RESUME BUKU DIGITAL DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 1(2). <https://doi.org/10.37249/jpma.v1i2.272>

